

**INTERAKSI ANTARA KELUARGA
DAN RUMAHTANGGA**

Oleh :
Prof.Dr. Selo Sumardjan
(Guru Besar FISIP UI)

Disampaikan pada seminar:
Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya
Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia
21-22 September 1993, Kampus IPB Darmaga Bogor

INTERAKSI ANTARA KELUARGA DAN RUMAHTANGGA

Oleh :
Selo Sumardjan

Di dalam literatur sosiologi dan antropologi terdapat banyak karangan tentang keluarga yang sering kali disebut sebagai kesatuan (unit) sosial yang terkecil di dalam masyarakat. Banyaknya karangan mengenai keluarga itu mungkin sekali disebabkan karena bentuk, susunan, kedudukan dan peranannya dalam kehidupan masyarakat menunjukkan keanekaragaman mengikuti pola kebudayaan masyarakatnya. Sebaliknya karangan tentang rumahtangga di dalam bidang sosiologi dan antropologi relatif tidak banyak. Pada hal keluarga dan rumahtangga di dalam masyarakat mana pun biasanya sukar dipisahkan, baik secara konsepsional maupun dalam kenyataan hidup. Kalaupun rumahtangga menjadi subyek penulisan, biasanya rumahtangga ditinjau dari sudut-sudut ekonominya.

Di dalam karangan ini akan dicoba melihat keluarga (family) dan rumahtangga (household) sebagai lembaga sosial atau pranata (social institutions) yang berbeda satu sama lainnya.

Yang dimaksudkan dengan keluarga di dalam karangan ini adalah kelompok manusia yang para warganya terikat dengan jalur keturunan. Dengan demikian maka dasar konsep ini sebenarnya adalah biologis. Akan tetapi karena sifatnya sebagai kelompok yang khas, kedudukannya sebagai pranata sosial mengandung berbagai hak dan kewajiban tertentu; lagi pula fungsinya di dalam tata hidup sosial mempunyai pengaruh yang menentukan mengenai pola-pola hubungan sosial antar manusia dan antar kelompok, maka di dalam karangan ini keluarga akan lebih banyak dibahas dalam aspek-aspek sosiologisnya. Sayang sekali karena keterbatasan tulisan ini tidak dapat memberi peluang yang cukup untuk menyetengahkan keluarga dalam aneka ragam dimensinya seperti misalnya keluarga inti (nuclear family), keluarga besar, fam, clan, trah, dan sebagainya. Pembahasan yang sekarang ini akan membatasi diri pada keluarga inti (nuclear family) yang hanya terdiri dari dua generasi dalam wujud bapak, ibu, dan anak-anaknya.

Adapun konsep rumahtangga yang disajikan di sini merupakan sistem hidup bersama dari kelompok manusia dalam suasana kebersamaan dan di bawah satu atap di mana para warganya menggunakan berbagai fasilitas kehidupan bersama, terutama fasilitas dapur untuk mengolah makanan. Secara normal suatu keluarga dengan rumahtangga membaur menjadi satu kesatuan. Akan tetapi tidak jarang terjadi, bahwa suatu rumahtangga menjadi wadah kehidupan tidak hanya bagi satu keluarga saja, akan tetapi sekaligus juga bagi orang-orang lain yang bukan warga keluarga inti seperti misalnya kakek, nenek, cucu, keponakan, paman, atau orang-orang lain yang mondok (in dekost).

Bahkan dikenal juga rumahtangga tanpa suatu keluarga inti di dalamnya seperti misalnya rumahtangga dari beberapa orang mahasiswa yang bertempat tinggal bersama dan mengatur serta mengurus kehidupannya sehari-hari bersama.

Oleh karena di dalam definisi keluarga terdapat unsur "dalam suasana kekeluargaan" maka tamu-tamu hotel atau restoran yang berada di bawah satu atap dan makan hasil masakan dari satu dapur tidak dapat dinamakan rumahtangga.

Sekiranya perlu diminta perhatian, bahwa unsur utama di dalam konsep keluarga adalah manusia-manusianya, sedang titik berat dalam konsep rumahtangga adalah sistem hidupnya bersama. Sudah barang tentu adanya suatu keluarga dalam suatu rumahtangga menimbulkan interaksi dengan saling berpengaruh antara kedua pranata itu.

FUNGSI SOSIAL KELUARGA

Secara umum dapat dikatakan, bahwa keluarga di dalam kehidupan masyarakat mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi sebagai mekanisme '*procreation*' yaitu mengadakan keturunan manusia yang selanjutnya melestarikan eksistensi masyarakat. Meskipun fungsi ini pada hakekatnya bersifat biologis, namun karena pengaruhnya yang strategis bagi masyarakat, pelaksanaan fungsi ini diatur dalam adat atau hukum, terutama dalam pranata perkawinan.
2. Fungsi sebagai kesatuan sosial (*social unit*) yang mendapat pengakuan dalam sistem adat, agama, pemerintahan, dan hukum.
3. Fungsi pemersatu dan pelindung bagi para warganya dalam hubungannya dengan pihak-pihak lain di luar keluarga.
4. Fungsi sosialisasi anak-anak melalui pendidikan agar mereka menjadi anggota masyarakat yang mengenal nilai-nilai serta kaedah-kaedah budaya yang berlaku.
5. Fungsi sebagai unit produksi di dalam masyarakat di mana diversifikasi profesi belum berpengaruh dalam sistem ekonominya.

Kelima fungsi itu dengan berbagai variasi pada umumnya berlaku kuat di dalam masyarakat adat yang masih banyak terdapat di daerah-daerah pedesaan di Indonesia. Sistem sosial, sistem hukum, sistem pemerintahan, bahkan sistem ekonominya di dalam masyarakat adat berlandaskan pada keluarga sebagai kesatuan. Manusia sebagai insan pribadi di dalam masyarakat itu seolah-olah tidak mempunyai identitas sendiri. Identitasnya, dan karena itu juga tanggungjawab sosialnya, mengikuti identitas keluarga.

Sebaliknya fungsi di dalam masyarakat modern seperti yang hidup dalam kota-kota besar di tanah air kita, masing-masing fungsi keluarga yang disebut di atas mengalami proses pelamahan yang makin lama makin mendalam. Proses itu terjadi karena tiap-tiap fungsi itu sebagian demi sebagian diambil alih oleh pranata-pranata sosial yang makin lama makin banyak jumlahnya dan makin besar pengaruhnya pada kehidupan keluarga. Sebagai contoh dapat disebut misalnya gerakan

keluarga berencana yang menganjurkan pembatasan-pembatasan dalam fungsi 'procreation', kebebasan hubungan sosial yang menimbulkan individualisme dan mengurangi fungsi keluarga sebagai pemersatu dan pelindung bagi para warganya, pranata-pranata pendidikan dan media komunikasi massa yang menyita perhatian anak-anak (juga orang dewasa) setiap hari selama berjam-jam, dan diversifikasi profesi yang membuka kesempatan lebar bagi setiap warga keluarga memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan tanpa mengikuti jejak kerja orang tua.

Bersama-sama dengan perubahan-perubahan dalam fungsi keluarga yang sejalan dengan proses modernisasi sosial itu berubahlah juga fungsi kepala keluarga.

Di sebagian terbesar dari masyarakat-masyarakat di dunia pola keturunan bersifat patrilinear, artinya mengikuti jalur laki-laki (bapak, suami). Sesuai dengan pola itu kebanyakan kepala keluarga adalah laki-laki. Menurut data dari Biro Pusat Statistik dari semua keluarga Indonesia 87,62% kepala keluarganya laki-laki dan hanya 12,38% perempuan. Dari proporsi kepala keluarga perempuan itu sebagian relatif kecil kedudukannya ditentukan menurut adat matrilineal (keturunan mengikuti jalur perempuan (ibu, istri)), sedang sebagian relatif besar karena kepala keluarga laki-laki meninggal atau meninggalkan keluarganya.

Di samping fungsi-fungsi keluarga sebagai suatu kolektivitas seperti tersebut di atas maka kepala keluarga secara individual memiliki fungsi sosial seperti berikut:

1. Kepala keluarga memberikan status sosial kepada keluarganya. Makin meningkat status sosialnya, makin meningkat pula status sosial para keluarganya. Makin menurun status sosial kepala keluarga, makin menurun pula status isteri dan anak-anaknya. "*Swarga nunut, neraka katut*", kata orang Jawa.
2. Kepala keluarga berkewajiban mendapatkan nafkah bagi keluarganya.
3. Kepala keluarga memberi identitas pada isteri dan anak-anaknya.
4. Kepala keluarga mewakili keluarganya dalam hubungan dengan pihak-pihak lain dalam masyarakat, baik di bidang pemerintah, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

Di bawah nanti akan dibahas variasi serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam fungsi-fungsi kepala keluarga mengikuti arus proses modernisasi sosial.

FUNGSI RUMAHTANGGA

Keluarga tidak dapat hidup tanpa rumahtangga, betapapun banyak atau sedikitnya jumlah warga keluarga itu. Bahkan keluarga yang hanya terdiri dari satu orang warga saja (one member family) seperti seorang laki-laki, perempuan, duda, atau janda yang hidup sendiri dan mandiri, hidup dengan rumahtangga.

Pada umumnya yang menjadi kepala rumahtangga adalah perempuan, yaitu

isteri/ibu dalam keluarga (housewife). Kalau pun isteri/ibu sudah meninggal, urusan rumahtangga biasanya dikepalai oleh salah seorang anak perempuan yang cukup umur, dan tidak oleh salah seorang anak laki-laki atau oleh seorang saudara perempuan (kalau ada) dari suami/bapak.

Tugas-tugas seorang kepala rumahtangga antara lain meliputi kewajiban-kewajiban di bawah ini:

1. Menjadi '*home maker*' bagi semua orang dalam rumahtangga dalam arti '*to make them feel at home*' atau menjadikan mereka krasan.
2. Mengurus segala keperluan anak, fisik, (kesehatan) psikologis (kebahagiaan) dan material (sandang dan keperluan material lain).
3. Mengurus pendidikan anak.
4. Mengurus pengolahan dan penyajian makan sehari-hari buat semua orang dalam rumahtangga.

Dalam rumahtangga keluarga yang kurang mampu biasanya tanggungjawab dan pelaksanaan urusan rumahtangga dipegang oleh isteri/ibu sendiri. Tetapi tanpa melepaskan tanggungjawab isteri/ibu sebagai kepala rumahtangga dari keluarga yang mampu, pelaksanaan rumahtangga dipercayakan sebagian atau seluruhnya kepada (para) pramuwisma atau pembantu rumahtangga.

Hubungan kepala rumahtangga dengan kepala keluarga dapat disamakan dengan hubungan manager perusahaan dengan direktur utama P.T. yang memiliki perusahaan itu. Kepala rumahtangga dalam urusan intern mempunyai kebebasan yang luas, tetapi mengenai hasil karyanya kepala rumahtangga bertanggungjawab kepada kepala keluarga.

KELUARGA DAN RUMAHTANGGA DALAM MASYARAKAT ADAT

Di dalam masyarakat adat, yaitu masyarakat yang kebudayaannya berlandaskan adat, interaksi antara keluarga dan rumahtangga pada umumnya erat sekali. Masyarakat adat di daerah-daerah pedesaan di Indonesia mempunyai penghidupan yang pada pokoknya berasal dari satu sumber utama yaitu peramuan (hunting, food collecting, fishing) bagi suku-suku yang hidup di tengah-tengah hutan atau rawa, perkebunan bagi masyarakat yang belum menguasai teknologi pertanian pangan, atau pertanian pangan bagi mereka yang sudah pandai mengolah tanah. Seluruh upaya nafkah diarahkan untuk '*survival*' atau bertahan hidup keluarga. Untuk itu dan karena tidak dikenal sumber nafkah lainnya, maka semua anggota keluarga, kecuali anak-anak balita dan manusia jompo, bersama-sama menjalankan aktivitas-aktivitas pencarian nafkah di luar rumah. Di dalam rumahtangga masing-masing anggota rumahtangga ikut serta secara aktif menurut kemampuan yang ditentukan atas dasar umur dan kelamin. Boleh dikatakan bahwa semua keperluan keluarga dan rumahtangga diproduksi di dalam rumahtangga. Dengan demikian keluarga dan rumahtangga terintegrasi dalam fungsinya di bidang produksi dan konsumsi keperluan hidupnya. Integrasi ekonomi ini dengan sendirinya menciptakan solida-

ritas keluarga yang kuat, baik dalam hubungan ke dalam maupun ke luar. Kepentingan dan tanggungjawab setiap warga adalah kepentingan dan tanggungjawab seluruh keluarga. Kewajiban keluarga terhadap masyarakat menjadi kewajiban setiap warga pula. *'One for all and all for one'* atau satu buat semua dan semua buat satu.

Tanpa ada organisasi Dharma Wanita maka suami isteri dalam urusan keluarga dan rumahtangga bersatu, juga dalam urusan pemerintahan apabila suami (jarang sekali isteri) memegang jabatan pemerintahan, misalnya sebagai kepala suku, lurah/kepala desa, kepala dukuh, dan sebagainya. Meskipun sudah diadakan pendidikan administrasi pemerintahan, masih banyak dianggap biasanya bahwa keuangan dinas lurah/kepala desa tercampur menjadi satu dengan keuangan rumah-tangga. Bagi seorang lurah/kepala desa dan orang-orang desa lainnya dianggap tidak aneh dan tidak salah kalau dalam inspeksi keuangannya oleh pejabat pamong praja atasan ibu lurah yang diminta (oleh suaminya dan bukan lurah kepala desa itu sendiri) untuk mewujudkan sisa uang yang menurut buku administrasi harus ada dalam kas desa. Sebaliknya masyarakat desa membenarkan sikap isteri kepala rumahtangga seorang lurah yang mengusir seorang Bupati (di Jawa Tengah) yang di dalam suatu kunjungan dinas menolak hidangan makan hasil pengolahan ibu lurah. Alasan Bupati adalah bahwa selama menjalankan tugas dinas seorang pejabat pemerintahan tidak dibenarkan menerima sesuatu pemberian atau sajian dari pihak yang didatanginya.

Di Indonesia ada golongan lain, golongan bukan petani, yang kehidupannya sehari-hari juga berpegang kuat pada adat. Seperti golongan ini juga mengalami perubahan budaya karena proses modernisasi. Bahkan proses perubahannya berjalan lebih cepat. Golongan ini adalah golongan bangsawan, keturunan raja-raja, panutan masyarakat dan pelestari adat. Golongan bangsawan ini dalam kelompok-kelompok lokal tersebar di daerah-daerah. Yang terbesar adalah bangsawan keturunan Sunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta di pulau Jawa.

Nilai sosial yang paling utama dan menjadi ukuran buat stratifikasi sosial dan menjadi pedoman perilaku dalam hubungan sosial adalah jarak keturunan dari raja. Generasi pertama dalam keturunan raja menempati kedudukan tertinggi dalam stratifikasi sosial. Generasi kedua menduduki taraf sederajat lebih rendah dan demikian selanjutnya. Status sosial menurut sistem *'ascription'* ini dinyatakan dengan berbeda-beda sebutan atau gelar kebangsawanan seperti misalnya dalam urutan-urutan dari atas ke bawah buat keturunan laki-laki GPH (Gusti Pangeran Hario), BPH (Bendoro Pangeran Hario), KPH (Kanjeng Pangeran Hario), KRMT (Kanjeng Raden Mas Tumenggung), KRT (Kanjeng Raden Tumenggung), KMT (Kanjeng Mas Tumenggung), Raden Mas, Raden, dan Mas. Buat keturunan perempuan ada gelar-gelar tersendiri dengan mengikuti sistem yang sama seperti GKR (Gusti Kanjeng Ratu), BRA (Bendoro Raden Ayu) dan seterusnya.

Untuk menjaga kekuasaan raja dan status sosial keluarga bangsawan dan

anak-anaknya ada kecenderungan membatasi perkawinan dalam golongan bangsawan. Apabila perkawinan itu bagi pihak laki-laki secara seksual kurang memuaskan maka ia dibenarkan oleh masyarakat agama dan hukum untuk mengambil isteri kedua sampai ke empat sebagai *selir*. Biasanya selir dipilih dari masyarakat di luar golongan bangsawan. Jadi berstatus sosial di bawah suami. (Undang-undang Perkawinan R.I. No.1/1974 menentukan syarat-syarat untuk isteri lebih dari satu orang).

Dalam kelas yang paling tinggi (di bawah tingkat raja yang mempunyai kedudukan tersendiri) suami sebagai kepala keluarga sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada status sosialnya. Penghasilannya yang didapat dari raja diberikan sepenuhnya kepada isteri yang berdarah bangsawan (isteri utama), sedang para selir mendapat bagian dari padanya. Isteri utama yang mendapat bagian penghasilan relatif besar memenuhi perannya sebagai kepala rumahtangga secara nominal saja karena berkewajiban menjaga status sosial keluarganya. Urusan rumahtangga dipercayakan kepada para abdi di bawah pengawasannya.

Masing-masing selir yang sering bertempat tinggal di ruangan tersendiri dalam rumah besar, mempunyai rumahtangga sendiri dengan anak-anaknya. Karena keterbatasan biaya maka pengurusan rumahtangga dilakukan sendiri, dibantu oleh abdi-abdi dalam jumlah menurut kemampuannya. Kepala keluarga (suaminya) praktis tidak pernah campur tangan dalam rumahtangga *selir*. Perlu diketahui karena sistem keturunan patrilineal maka anak-anak bangsawan dari selir (yang bukan warga bangsawan) berstatus lebih tinggi dari ibunya. Mereka panggil ibunya tidak dengan kata *ibu*, tetapi dengan kata *bibi* yang kurang lebih berarti pengasuh. Dalam komunikasi *bibi* menggunakan *krama inggil* (bahasa Jawa halus) pada anaknya. Sebaliknya anak menggunakan bahasa *ngoko* (bahasa Jawa terhadap rendahan) kepada bibinya.

Di dalam kelas bangsawan menengah dan juga dalam kelas priyayi (pejabat pemerintahan raja bukan keturunan) hubungan antara keluarga dan rumahtangga berbeda. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban utama untuk menjunjung tinggi status sosialnya. Meskipun gajinya kecil dan tidak cukup untuk membiayai rumahtangga seorang priyayi tidak dibenarkan merendahkan derajatnya dengan usaha untuk menambah penghasilan (income). Dia juga tidak pantas menjalankan pekerjaan '*kasar*' dalam rumahtangga. Pekerjaan itu sepenuhnya menjadi kewajiban isterinya sebagai kepala rumahtangga. Untuk mendapatkan tambahan biaya maka bagi kepala rumahtangga tidak ada halangan sosial untuk berdagang. Tetapi bidang perdagangannya harus serasi dengan status sosial kepala keluarga sebagai priyayi, yaitu bidang batik dan mas, perak dan batu-batu mulia. Hampir semua perusahaan batik di Surakarta dan Yogyakarta ada di bawah manajemen kepala rumahtangga priyayi dan demikian juga banyak usaha mas, perak, dan batu mulia. Dengan demikian ada pemisahan yang agak tajam antara keluarga dan rumahtangga. Suami sebagai kepala keluarga menjada status sosial keluarga

dan mewakilinya di muka umum, sedang isterinya sebagai kepala rumahtangga mengurus ekonomi intèrnnya. Suami dan isteri dengan tanggungjawabnya masing-masing harus menjaga jangan sampai keluarganya *'di luar garang, tetapi di dalam garing'*. Artinya; *'Garang'* adalah gagah, bergengsi, berstatus tinggi. *'Garing'* adalah kering (dalam ekonomi rumahtangga).

Dalam hal seorang putri bangsawan bersuami seorang bukan bangsawan, status sosialnya tetap bersifat bangsawan lengkap dengan gelarnya, tetapi umumnya di dalam rumahtangga secara aktif berperan sebagai kepala. Suami berkewajiban mencari nafkah yang cukup untuk membiayai rumahtangga setaraf status sosial isterinya. Mungkin suami berbicara dengan isterinya dengan *'krama hinggil'* (di muka umum) dan isterinya membalas dalam bahasa Jawa *'ngoko'*. Anak mereka bukan bangsawan.

Di kalangan priyayi tingkat rendah yang berpenghasilan amat kecil suami dan isteri biasanya bersama-sama atau sendiri-sendiri mencari tambahan nafkah. Rumahtangganya pun biasa diuruskan bersama-sama oleh karena mereka tidak mampu membayar abdi atau pembantu rumahtangga. Tidak jarang orang melihat seorang priyayi sebagai suami menggendong anak kecil sambil membersihkan rumah pada waktu isterinya pergi mencari nafkah.

KELUARGA DAN RUMAHTANGGA DALAM MASYARAKAT MODERN

Masyarakat modern di Indonesia pada umumnya bermukim di kota, terutama di kota besar. Modernitas masyarakat itu ditandai secara phisik dengan penggunaan teknologi modern baik di dalam maupun di luar rumahtangga. Lagi-pula dapat diamati kebebasan yang lebih longgar dalam hubungan antar manusia dibanding dengan hubungan dalam masyarakat adat. Kedua hal itu tampak pengaruhnya pada keluarga dan rumahtangga pada umumnya, akan tetapi pada khususnya pada keluarga dan rumahtangga di lapisan sosial atas dan menengah. Masyarakat lapisan rendah sudah barang tentu juga mengalami hal-hal itu, akan tetapi dalam skala terbatas.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan dalam keluarga dan rumahtangga dari masyarakat adat menjadi masyarakat modern dapat terjadi karena perkembangan di tiga hal di bawah ini.

Dengan berkembangnya demokrasi politik dan sosial maka hubungan antara kaum perempuan secara umum menjadi lebih bebas. Kebebasan ini meresap juga dalam hubungan antara suami dan isteri sebagai kepala keluarga dan kepala rumahtangga.

Selanjutnya dengan kemajuan ekonomi selama pembangunan nasional timbul proses diversifikasi pekerjaan dalam skala yang demikian luasnya sehingga makin lama makin banyak kesempatan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan serta kemampuannya.

Lain daripada itu teknologi baru terus menerus berkembang sampai

menembus ke dalam rumahtangga penduduk sehingga sedikit atau banyak dapat membebaskan kepala rumahtangga dari berbagai pelaksanaan kewajibannya.

Ketiga faktor itu secara sosiologis tampak pengaruhnya pada hubungan antara suami sebagai kepala keluarga dan isterinya sebagai kepala rumahtangga. Isteri sebagai seorang perempuan merasa identitasnya sebagai warga masyarakat lebih kuat diakui oleh umum. Akibatnya dalam hubungannya dengan suaminya maka isteri itu merasa kedudukannya bertambah kuat pula sebaliknya dominasi suami terhadapnya menjadi bertambah lunak.

Bagaimana pengaruh itu tampak dalam hubungan antara suami dan isteri selaku kepala keluarga dan kepala rumahtangga di berbagai lapisan masyarakat modern dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Di dalam lapisan sosial tingkat atas suami sebagai kepala keluarga tampak jelas fungsinya untuk mempertahankan, bahkan di mana dapat meningkatkan, status sosialnya beserta status sosial seluruh keluarganya di tingkat atasan. Perhatiannya sepenuhnya dicurahkan pada status sosial itu, sehingga urusan rumahtangga hampir seluruhnya dipercayakan kepada isterinya sebagai kepalanya. Hanya kadang kala suami sebagai kepala keluarga memberi tegoran dan barangkali pedoman apabila di dalam pengurusan rumahtangga terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kedudukan tinggi yang ditempatinya di dalam masyarakat.

Isteri sudah barang tentu ikut bangga berdampingan dengan suaminya yang berstatus tinggi di bidang ekonomi atau di bidang pemerintahan. Seperti yang diharapkan dari para anggota Ria Pembangunan, yaitu para isteri menteri, dan para anggota Dharma Wanita, yaitu para isteri pegawai negeri dan pada pegawai negeri wanita, maka mereka itu wajib mendampingi suami baik di bidang sosial maupun di bidang kedinasannya, termasuk menjaga wibawanya. Tanpa mencontoh kedua organisasi wanita dalam pemerintahan itu maka para isteri tokoh-tokoh di bidang bisnis swasta merasa dirinya juga untuk memberi dukungan kepada suaminya demi status sosial dan wibawanya dalam masyarakat.

Oleh karena kewajiban para isteri dalam lapisan sosial tingkat atas yang terjalin rapat dengan status sosial suaminya itu maka mereka tidak dapat terlalu banyak memberikan waktu serta perhatian pada kewajiban-kewajibannya sebagai kepala rumahtangga. Kekayaan finansial dan material memungkinkan mereka membiayai pembantu-pembantu rumahtangga dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan urusan rumahtangga. Kepala rumahtangga tinggal memberikan pedoman-pedoman umum serta menjalankan pengawasan saja.

Keluarga dari lapisan sosial atas biasanya hanya menyimpan uang dalam jumlah terbatas di rumahnya. Simpanan yang besar ada di dalam bank, satu atau beberapa bank. Suami sebagai kepala rumahtangga dan isterinya sebagai kepala rumahtangga mungkin mempunyai '*joint bank account*' yang dapat diambil uangnya oleh masing-masing setiap waktu diperlukan. Mungkin suami isteri mempunyai '*separate bank account*' apabila mereka masing-masing tidak mau dikontrol

oleh mitra hidupnya dalam pengeluaran uangnya di bank. Cara penggunaan simpanan uang di bank itu sekarang dipermudah lagi dengan menyebarnya '*credit card*' yang dapat dipegang sendiri-sendiri baik oleh suami maupun oleh isteri. bahkan banyak keluarga kaya yang membolehkan anak-anaknya mempunyai '*credit card*' pribadi yang berinduk pada simpanan uang bapak atau ibunya di bank.

Di dalam keluarga modern dari lapisan atas tidak ada tuntutan peran ganda bagi kepala keluarga. Andaikata kepala keluarga dituntut untuk membantu dalam urusan rumahtangga sehari-hari maka tuntutan itu malahan akan merugikan keluarga serta rumahtangga, oleh karena urusan rumahtangga itu menyita waktu dan perhatiannya yang sebenarnya lebih produktif dicurahkan pada kewajiban-kewajiban lain di luar rumahtangga yang secara sosial dan finansial dapat melestarikan dan memperkuat status seluruh keluarga, termasuk rumahtangga, dalam pandangan masyarakat.

Pihak isterinya pun sebenarnya secara finansial tidak memerlukan peran ganda dalam arti peran di dalam dan di luar rumahtangga. Peran ganda yang dituntut dari padanya bukan berarti peran ganda untuk menambah penghasilan, akan tetapi peran ganda untuk mendampingi suami di luar rumahtangga dan untuk memimpin serta mengurus rumahtangga bagi keluarganya. Kegiatannya di luar rumahtangga tidak bersifat kegiatan yang ekonomis produktif, akan tetapi malahan kebanyakan ekonomis konsumtif, atau juga sosial dan seremonial. Dengan kemampuan suaminya untuk menyediakan uang lebih dari cukup untuk membayar staf pembantu rumahtangga dan menyediakan alat-alat rumahtangga yang modern maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kepala rumahtangga kelas atas untuk menarik suaminya sebagai kepala keluarga terjun aktif ke dalam rumahtangga.

Interaksi kepala keluarga dan kepala rumahtangga di dalam kelas menengah menunjukkan gambaran berbeda. Dibandingkan dengan kepala keluarga dari lapisan atas (*upper class*) yang memiliki berbagai sumber penghasilan sehingga kekayaannya menumpuk berlebihan di atas keperluan hidupnya, maka kepala keluarga dari lapisan menengah (*middle class*) harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang mampu membiayai rumahtangga agar keluarganya dapat hidup serba cukup (*comfortable*) dan mempunyai sisa simpanan uang atau benda untuk masa depan. Meskipun status sosial yang terhormat dan terpuja diperhatikan olehnya, namun yang lebih penting baginya adalah penghasilan yang dapat diperoleh dari kegiatan kerjanya.

Dalam keadaan yang demikian maka suami sebagai kepala rumahtangga sebenarnya perlu mencurahkan segenap kemampuannya untuk mendapatkan penghasilan yang diperlukan untuk rumahtangganya. Akan tetapi oleh karena jumlah penghasilannya untuk ukuran rumahnya tidak mengizinkan baginya untuk membayar pembantu rumahtangga cukup banyak untuk mengerjakan semua kegia-

tan yang diperlukan sehari-hari, ada kalanya kepala keluarga harus terjun membantu di dalam rumahtangga.

Kalau diadakan survei mengenai sikap kepala keluarga terhadap peran ganda isterinya sebagai kepala rumahtangga, mungkin sekali sebagian terbesar kepala keluarga akan menyatakan, bahwa mereka lebih senang apabila isterinya menjadi kepala rumahtangga sepenuhnya tanpa bekerja di luar rumah. Akan tetapi mungkin penghasilan kepala keluarga tidak cukup untuk mendukung status sosialnya seperti yang lazim menurut ukuran sosial dalam masyarakat di sekelilingnya. Atau mungkin isterinya berpendidikan cukup tinggi, berkemampuan cukup produktif, lagipula mempunyai kebebasan jiwa yang tidak tahan dikurung. Dalam keadaan yang demikian sudah sewajarnya apabila kepala keluarga menyetujui isterinya merangkap tugasnya sebagai kepala rumahtangga dengan pekerjaan di luar rumah. Berbeda pula dengan pola di dalam masyarakat pertanian di mana suami isteri bekerja berkelompok di luar rumah maka di dalam masyarakat modern suami isteri cenderung mempunyai jabatan atau pekerjaan di luar rumah yang terpisah satu dari lainnya. Hal ini menimbulkan apa yang di dalam bahasa asing dinamakan '*double career family*'.

Selama kepala keluarga dari pekerjaannya mendapat penghasilan yang lebih banyak daripada penghasilan isterinya dan selama kedudukan jabatan atau pekerjaannya oleh masyarakat dianggap lebih unggul daripada isterinya maka hal itu tidak akan menimbulkan banyak persoalan dalam hubungan antara kedua pihak. Akan tetapi apabila yang terjadi sebaliknya maka hal itu mudah menimbulkan berbagai masalah. Kalau isteri dalam pergaulan sosial biasa mendampingi suami, maka kebanyakan suami malu atau tidak sanggup mendampingi isterinya yang berstatus sosial lebih unggul daripadanya. Juga isteri yang ekonomis atau sosial lebih unggul itu dalam kedudukannya sebagai kepala rumahtangga mungkin sekali merasa lebih bebas dan tidak terlalu tergantung dari kekuasaan kepala keluarga. Kepala keluarga bisa merasa monoton saja di dalam rumahtangganya.

Selama hubungan antara kepala keluarga dan kepala rumahtangga melalui jalur vertikal, '*unter geordnet*' kata orang Jerman, maka pimpinan ada di satu tangan dan kemungkinan konflik tidak banyak. Akan tetapi apabila kepala keluarga dan kepala rumahtangga kurang lebih sama kuatnya, '*neben geordnet*' dalam bahasa Jerman, atau malahan kepala rumahtangga lebih kuat kemampuannya daripada kepala keluarga maka situasi yang pincang ini dapat merugikan pada keserasian hubungan antara kedua pihak. Berbeda dengan hubungan antara kepala keluarga dan kepala rumahtangga di dalam golongan priyayi dalam masyarakat adat. Di dalam masyarakat itu dibenarkan bahwa kepala keluarga melulu menjaga status sosial, sedang kepala rumahtangga mencari tambahan nafkah untuk mencukupi keperluan rumahtangga.

Di dalam '*single career family*' dari kelas menengah dalam masyarakat modern kepala keluarga yang berfungsi sebagai pencari nafkah tunggal mungkin

sekali menyerahkan semua uang gaji yang diterima setiap bulan kepada isterinya untuk membiayai keperluan rumahtangga. Ada juga yang menyimpan penghasilan kerjanya dalam bank dan mengambilnya dalam jumlah cukup setiap kali diminta oleh isterinya. Pola penyimpanan uang dalam bank yang demikian itu lebih biasa dilakukan oleh para kepala keluarga yang penghasilan kerjanya tidak tetap seperti yang dapat diamati dikalangan para pengusaha, pedagang dan di kalangan profesi bebas. Seperti juga di kelas atas, maka di kelas menengah cara pembiayaan keperluan rumahtangga dipermudah dengan penggunaan '*credit card*' atas nama kepala keluarga atau pun kepala rumahtangga. Ada keluarga kelas menengah yang mengizinkan anak-anak mempunyai '*credit card*' sendiri, akan tetapi proporsinya sekiranya tidak sebanyak seperti di kalangan kelas atas.

Pola yang dianut oleh '*double career family*' dari kelas menengah juga bervariasi menurut proporsi uang yang dapat dimasukkan oleh masing-masing pihak ke dalam rumahtangga. Penyimpanan uang di dalam bank oleh suami dan isteri dari uang penghasilan kerjanya masing-masing cenderung untuk dilakukan secara '*separate bank account*' sehingga masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk menggunakannya. Kebebasan menarik uang dari bank itu digunakan biasanya untuk pengeluaran pribadi yang relatif kecil. Akan tetapi untuk keperluan rumahtangga yang berarti kepentingan seluruhkeluarga maka keputusan untuk mengeluarkan uang cenderung diambil setelah diadakan musyawarah antara kepala keluarga dan kepala rumahtangga.

Kalau kita memperhatikan interaksi antara keluarga dan rumahtangga di dalam kelas menengah di dalam masyarakat kota maka tampak banyak persamaan dengan pola di dalam masyarakat pertanian adat. Karena kekurangan penghasilan untuk keperluan rumahtangga maka suami isteri terpaksa mencari nafkah di mana saja dan sumber yang dapat digali. Suami biasa bekerja terpisah di luar rumah dan karena mereka tidak cukup berpenghasilan untuk membiayai pembantu rumahtangga, maka urusan rumahtangga juga biasa dilakukan bersama-sama, tetapi dengan pembagian tugas menurut kelamin, oleh kepala keluarga dan kepala rumahtangga. Untuk keperluan pembiayaan rumahtangga penghasilan kedua pihak dijadikan satu dan digunakan bersama menurut kebijaksanaan kepala rumahtangga, kecuali kalau ada sebagian dari penghasilan kepala keluarga yang dirahasiakan olehnya untuk keperluan diri pribadi. Di dalam keluarga kelas rendah tidak ada simpanan dalam bank. Bahkan simpanan di luar bank pun mungkin sekali tidak ada. Untuk jajan anak-anaknya tidak disediakan uang atau uang jajan, akan tetapi kepada mereka diberikan uang setiap kali diperlukan. Atau anak-anak malahan dituntut untuk ikut mencari nafkah tambahan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas mengenai interaksi kepala keluarga dengan kepala rumahtangga di dalam masyarakat-masyarakat adat dan modern di Indonesia dapat

ditarik beberapa kesimpulan di bawah ini.

Di sebagian terbesar suku-suku di Indonesia kedudukan beserta hak dan kewajiban sebagai kepala keluarga ditempati dan menjadi tanggungjawab suami. Adapun kedudukan dan hak serta kewajiban sebagai kepala rumahtangga ada di tangan dan menjadi tanggung jawab isteri.

Interaksi antara kepala keluarga dan kepala rumahtangga menunjukkan berbagai variasi yang sedikit banyak dipengaruhi oleh stratifikasi sosial keluarga. Pada umumnya stratifikasi sosial keluarga mengikuti stratifikasi kepala keluarga.

Mengenai interaksi antara kepala keluarga dan kepala rumahtangga itu ada tiga faktor pokok perkembangan sosial yang berpengaruh: (a) perkembangan demokrasi yang meresap ke dalam keluarga dan rumahtangga; (b) perkembangan ekonomi yang menciptakan diversifikasi jabatan dan pekerjaan, juga untuk kaum perempuan; (c) perkembangan teknologi modern yang mempermudah, bahkan dalam beberapa hal mengambil alih pelaksanaan urusan rumahtangga.

Ketiga faktor perkembangan sosial itu mempunyai pengaruh yang berbeda di lapisan sosial atas, menengah dan rendah. Pengaruh yang demikian itu tampak baik di dalam masyarakat adat maupun di dalam masyarakat modern.

Di dalam keluarga dari lapisan sosial atas (upper class) kepala keluarga dan kepala rumahtangga atau suami dan isteri bersama-sama mementingkan sekali usaha menjaga dan mempertahankan status sosial mereka yang tinggi. Kepala keluarga tidak berminat dan karena statusnya yang tinggi tidak dibenarkan untuk ikut serta aktif mengurus rumahtangga. Kepala rumahtangga hanya memberikan sebagian saja dari perhatian dan waktunya pada urusan rumahtangga. Urusan itu hampir sepenuhnya dipercayakan pada para pembantu rumahtangga. Kepala rumahtangga menjalankan kewajibannya secara minimal.

Kepala keluarga kelas atas di dalam masyarakat adat pada umumnya menyerahkan semua penghasilan kerjanya pada kepala rumah tangga yang bebas menggunakannya. Kepala keluarga kelas atas di dalam masyarakat modern memiliki '*bank account*' bagi dirinya sendiri dan sebagian disediakan untuk digunakan oleh kepala rumah tangga. Untuk keperluan pribadi sebagai istri disediakan '*bank account*' atas namanya sendiri. Kepada anak-anak disediakan '*credit card*' yang bersumber dari '*bank account*' ayah atau ibunya.

Karena penghasilan kepala keluarga yang lebih dari mencukupi untuk menopang kebutuhan sehari-hari maka tidak perlu peran ganda (mencari penghasilan di luar rumah tangga) bagi kepala rumah tangga.

Meskipun status sosial dianggap penting oleh keluarga lapisan menengah (middle class), penghasilan untuk membiayai rumah tangga mempunyai nilai yang lebih utama baginya. Meskipun penghasilan kepala rumah tangga cukup untuk menopang rumah tangga, namun banyak kepala rumah tangga merasa tidak tahan sehari-hari terkurung di dalam rumah tangga. Lagi pula pendidikan sosial dan pendidikan intelektualnya menghendaki suatu '*self expression*' di dalam masyarakat

kat. Jalan keluarnya adalah peran ganda bagi kepala rumah tangga. Tanpa melepas tanggung jawab di dalam rumah tangga, urusannya dipercayakan kepada pembantu. Bimbingan anak dilakukan apabila ayah atau ibu bertemu dengan mereka di sela-sela pekerjaannya. Kepala keluarga dan kepala rumah tangga mempunyai '*bank account*' terpisah. Keperluan biaya rumah tangga diambilkan dari '*bank account*' kepala keluarga seluruhnya atau juga ditambah dari '*bank account*' kepala rumah tangga menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Keluarga dari lapisan sosial rendah (*lower class*) tidak cukup penghasilannya dari kepala keluarga saja untuk membiayai keperluan rumah tangganya. Oleh karena itu kepala keluarga dan kepala rumah tangga terpaksa mencari penghasilan di luar rumah, mungkin bersama-sama di suatu bidang kegiatan, tetapi mungkin juga secara terpisah. Penghasilan dari kedua sumber pada umumnya digabungkan menjadi satu dibawah kekuasaan rumah tangga. Karena keterbatasan penghasilan, di dalam keluarga dan rumah tangga kelas rendah tidak ada '*bank account*' atau '*credit card*'. Juga tidak ada pembantu rumah tangga.

Mengenai kekuasaan kepala keluarga dalam hubungannya dengan rumah tangga dapat dikatakan, bahwa pada umumnya kekuasaan kepala keluarga di dalam lapisan sosial tinggi dominan terhadap kepala rumah tangga (*uber geordnet*). Di dalam keluarga lapisan menengah mungkin kepala keluarga lebih kuasa daripada kepala rumah tangga, tetapi mungkin juga kekuasaan mereka sama tingginya (*neben geordnet*). Di dalam keluarga lapisan sosial rendah boleh dikatakan bahwa kekuasaan kedua pihak itu sama kuatnya sehingga urusan rumah tangga dilakukan secara kolektif antara kepala keluarga dan kepala rumah tangga.